

**KOMUNITAS *URBAN FARMING* DAN KEDAULATAN PANGAN:
STUDI KASUS DI JAKARTA, BANDUNG DAN BOGOR**

Oleh:
Zulfadhli Nasution
NPM. 250120130005

ARTIKEL ILMIAH

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna mengikuti Seminar Usulan Penelitian
pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Konsentrasi Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2015**

**KOMUNITAS URBAN FARMING DAN KEDAULATAN PANGAN:
STUDI KASUS DI JAKARTA, BANDUNG DAN BOGOR**
*URBAN FARMING COMMUNITIES AND FOOD SOVEREIGNTY:
CASE STUDY IN JAKARTA, BANDUNG AND BOGOR*
Zulfadhli Nasution
Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

This research paper has attempted to examine how and to what extent urban farming communities and food sovereignty in Indonesia engage each other. It is done by two ways: 1) examination of two pillars of food sovereignty practised among urban farming communities namely localisation of food system and nature stewardship; 2) examination on how peasantry-based food sovereignty movements see the significance of urban farming communities in applying food sovereignty concept and to build mutual linkage between them. Case study from three cities – Jakarta, Bandung and Bogor – shows that food sovereignty discourse has not (yet) much exposed the urban farming communities because, 1) urban farming as movements has different historical background and root of emergence with food sovereignty concept that was brought by rural peasantry-based movements, and 2) so the both also have different social characters and political views. On the other hand, the representatives of food sovereignty movement suggest at least two important prerequisites to strengthen the construction of food sovereignty among urban food advocates specifically 1) building consumer consciousness on food system among urban groups, and 2) building urban and rural solidarity.

I argue that the emergence of urban farming movements can be a sign of the beginning and transition phase of food movement into urban setting that further can be a great chance for food sovereignty to fulfill the discourse on more sustainable and just food activism. For this, it needs more inclusive food sovereignty movements toward urban population, yet the urban communities should frame their activism to be critical to the existing industrialized food system. As initial research on this issue in Indonesia, this hopefully can bring insight and reflection – including for the global South – to enrich food sovereignty discourse as different context, setting, and geography perhaps should have different strategy and entry point.

Key words: food sovereignty, urban farming, food movement

*Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Konsentrasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*

KOMUNITAS URBAN FARMING DAN KEDAULATAN PANGAN: STUDI KASUS DI JAKARTA, BANDUNG DAN BOGOR

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa komunitas *urban farming* dan kedaulatan pangan di Indonesia saling berkaitan. Untuk melakukannya dilakukan dengan dua cara: 1) meneliti sejauh mana dua pilar kedaulatan pangan dipraktekkan oleh komunitas *urban farming* yaitu lokasi sistem pangan dan pemeliharaan lingkungan; 2) meneliti bagaimana gerakan kedaulatan pangan memandang signifikansi komunitas *urban farming* dalam mengaplikasikan konsep kedaulatan pangan dan potensi untuk membangun hubungan mutualisme. Studi kasus dari tiga kota yang diteliti – Jakarta, Bandung dan Bogor – menyimpulkan bahwa wacana kedaulatan pangan belum terpapar kepada komunitas *urban farming* dikarenakan, 1) *urban farming* sebagai gerakan memiliki latar belakang dan akar historis yang berbeda dengan kemunculan gerakan kedaulatan pangan yang pada mulanya dibawa oleh gerakan berbasis pertanian pedesaan, dan 2) keduanya juga memiliki perbedaan karakter sosial dan politik (pangan). Di sisi yang lain, perwakilan gerakan kedaulatan pangan menyatakan setidaknya dibutuhkan dua prasyarat untuk memperkuat konstruksi kedaulatan pangan di antara penggerak isu pangan di perkotaan yaitu 1) membangun kesadaran konsumen tentang sistem pangan di antara kelompok urban, dan 2) membangun solidaritas antara desa dan kota.

Penulis berpendapat bahwa kehadiran gerakan *urban farming* merupakan tanda dimulainya transisi gerakan pangan menuju area perkotaan yang selanjutnya menjadi kesempatan terbuka untuk menyertakan wacana kedaulatan pangan dalam membangun aktivisme yang lebih berkelanjutan dan adil. Untuk terwujudnya hal tersebut, dibutuhkan gerakan kedaulatan pangan yang lebih inklusif bagi populasi perkotaan, sedangkan komunitas urban pun harus merefleksikan gerakannya untuk lebih kritis terhadap sistem pangan industrialis yang ada saat ini. Diharapkan sebagai studi awal mengenai isu ini di Indonesia, penelitian ini dapat membawa inspirasi dan refleksi terutama di negara-negara yang serupa untuk memperkaya diskursus kedaulatan pangan bahwa setiap konteks, *setting*, dan geografi yang berbeda membutuhkan strategi dan *entry point* yang berbeda pula untuk diperhatikan.

Kata kunci: kedaulatan pangan, urban farming, gerakan pangan

1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, istilah “kedaulatan pangan” (“*food sovereignty*”) semakin mendapatkan perhatian dari para aktivis dan akademisi di dunia agraria dan pangan global. Istilah “*food sovereignty*” mencapai lebih dari 809.000 *hit* di mesin pencari Google pada bulan Oktober 2014 dan lebih dari 11.100 *hit* jika dijelajahi di Google Scholar (Akram-Lodhi, 2015). Beberapa badan multilateral bidang pembangunan desa seperti *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), *World Food Programme* (WFP), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dan *International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development* (IAASTD) telah mencantumkan istilah tersebut dalam diskusi-diskusinya (Akram-Lodhi, 2015, Jarozs, 2014; Ishii-Eiteman, 2009). Negara-negara seperti Bolivia, Ekuador, Mali, Nepal, Senegal dan Venezuela juga telah mengadopsi istilah tersebut dalam konstitusinya. Berbagai organisasi masyarakat sipil berbasis pangan juga menempatkan konsep kedaulatan pangan sebagai prinsip-prinsip pelaksanaannya (Akram-Lodhi, 2015).

Berbeda dengan istilah “ketahanan pangan” (“*food security*”) yang menitikberatkan pada solusi berbasis pasar dan moneter dan “tidak menaruh perhatian tentang struktur dan kebijakan yang tidak setara” dalam permasalahan pangan sebagai faktor yang merusak penghidupan dan lingkungan pedesaan (*ibid*), kedaulatan pangan didefinisikan sebagai

“Hak bagi masyarakat terhadap pangan yang sehat dan sesuai dengan kultur, yang dihasilkan melalui metode yang bergantung pada ekologi dan berkesinambungan, serta hak untuk menentukan sistem agrikultur untuk pangan mereka sendiri” (Nyeleni Declaration, 2007).

Kedaulatan pangan lahir pada 1990-an sebagai respon terhadap krisis agraria global akibat penarikan bantuan sektor agrikultur di wilayah negara-negara Selatan melalui liberalisasi perdagangan dan kebijakan penyesuaian struktur (*structural adjustment policies*) (McMichael, 2014). Kerangka kedaulatan pangan pertama kali dibangun oleh gerakan petani kecil (*peasants*) La Via Campesina (LVC) (Robbins, 2015; Block, et.al, 2012) dan kebanyakan mencakup gerakan agraria/pangan transnasional di area pedesaan (Borras, 2010; Borras, et. al, 2008), namun demikian,

saat ini konsep tersebut sudah mulai berhijrah juga ke perkotaan sebagai area konsumen dalam mengantisipasi masalah ekologi dan distribusi pangan yang tidak adil (McMichael, 2014). Mengikuti perkembangan tersebut, produksi pangan di area urban dan peri-urban saat ini juga didiskusikan dalam kerangka kedaulatan pangan, terutama dalam aspek lokalisasi pangan sebagai salah satu pilarnya (Edelman, et. al, 2014). Salah satu bentuk gerakan memproduksi pangan di perkotaan dalam kerangka ini adalah *urban farming*.

Dengan kompleksitas kondisi yang mempengaruhi pangan – bertumbuhnya jumlah penduduk perkotaan, tetapi di sisi lain jumlah petani sebagai produsen pangan (termasuk untuk perkotaan) menurun, selain itu juga terjadi ekspansi industri dan komodifikasi pangan – penelitian ini mencoba menganalisis inisiatif *urban farming* sebagai salah satu cara yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan pangan perkotaan saat ini dan relasinya dengan kedaulatan pangan.

Tren berkebun dalam komunitas mulai bermunculan di area dengan karakteristik urban di Indonesia. Gerakan tersebut melibatkan penduduk perkotaan, termasuk pemuda untuk mengolah lahan kosong di area kota dan mempromosikan aktivitasnya melalui media sosial seperti Twitter dan Facebook. Untuk menyebut salah satu contoh, Indonesia Berkebun yang diluncurkan pada 2011 dan saat ini telah memiliki jaringan di 33 kota – yang merepresentasikan pulau-pulau terbesar– dan 9 universitas di Indonesia (Indonesia Berkebun, 2015). Gerakan ini mengartikulasikan inisiatifnya dengan tiga nilai yaitu nilai ekologis untuk membuat ruang hijau di perkotaan; nilai ekonomis yang mungkin akan membawa keuntungan dan keberlanjutan pendapatan seperti di Kuba; dan nilai edukatif serta sosial untuk memperkuat inisiatif tersebut. Dikatakan pula bahwa populasi urban dapat juga bertindak sebagai produsen makanan, bukan hanya sebagai konsumen, terutama dalam mengantisipasi krisis pangan dunia, dan untuk menjadi lebih tidak tergantung pada produksi daerah pedesaan (*ibid*).

Kaitannya dengan kedaulatan pangan, walaupun pada awalnya dilahirkan dari respon petani desa di negara-negara Selatan (Alonso-Fradejas, et. al, 2015), tetapi telah berevolusi dan tidak hanya menjadi gerakan petani gurem (McMichael, 2014). McMichael (2014) berargumen bahwa “mungkin seseorang mengatakan bahwa gerakan ini didorong oleh perspektif petani dalam menggarisbawahi pentingnya revaluasi

pertanian untuk penyediaan pangan domestik dan untuk mengatasi kesenjangan sosial, namun demikian pertumbuhan kedaulatan pangan saat ini sudah lintas pemisahan desa-kota.” Dia juga lebih lanjut menjelaskan bahwa kedaulatan pangan telah menginspirasi baik secara implisit dan/atau eksplisit berbagai komunitas, termasuk konsumen, pertanian skala kecil dan kelas penduduk urban untuk mengembangkan strategi adaptif yang berkaitan juga dengan pandangan kedaulatan pangan terhadap rezim pangan dan kerawanan pangan, baik mereka menyebutnya sebagai konsep kedaulatan pangan atau tidak (*ibid*).

Beberapa makalah telah mengaitkan *urban farming* dan kedaulatan pangan tetapi juga masih berfokus pada negara-negara Utara. Beberapa contohnya: konvergensi dan divergensi wacana ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di antara pertanian perkotaan (Lyons, 2014), praktek aktivisme pangan perkotaan dan kedaulatan pangan di Chicago (Block, et. al, 2012), gerakan pangan urban dan kedaulatan pangan di Amerika Serikat (Clendenning, et al 2015). Di negara Selatan, beberapa studi memotret pencapaian luar biasa dari Kuba yang menyimpulkan bahwa kebijakan kedaulatan pangan di Kuba tidak hanya melibatkan masyarakat sipil tetapi juga masyarakat politik mulai dari arena lokal hingga internasional (Gürcan, 2014).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Edelman, et. al (2014), signifikansi agrikultur di perkotaan akan meningkat, terutama di dalam konteks cepatnya pertumbuhan penduduk perkotaan negara-negara Selatan, di mana produksi pangan di perkotaan masih sulit dikuantifikasi mengingat bahwa kebanyakan dari inisiatif tersebut lahir secara independen untuk penghidupan oleh individu-individu atau kelompok yang mengolah lahan-lahan kosong untuk memproduksi makanan sebagai upaya subsisten atau pasokan ke pasar. Namun pertanyaan yang juga muncul adalah sebagaimana Robbins (2015) mempertanyakan apakah sistem pangan lokal – salah satunya yang dikembangkan melalui *urban farming* -- dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang masif dan bagaimana diskursus tentang kedaulatan pangan dapat terintegrasi dengan gerakan pangan perkotaan yang mungkin tidak selalu menginginkan transformasi sistem pangan yang utama tetapi sekedar untuk mengatasi isu praktis dalam memperoleh makanan.

Mengingat dinamika tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan sentral penelitian: ***Bagaimana dan sejauh mana praktek urban farming di Indonesia, memiliki kaitan dengan konsep kedaulatan pangan?***

Untuk membangun kerangka bagi pertanyaan sentral tersebut, penelitian ini juga akan menjawab subpertanyaan pertama mengenai *bagaimana gerakan urban farming di Indonesia dipraktekkan dan menyertakan konsep kedaulatan pangan?* Sejauh ini, mungkin konsep kedaulatan pangan masih menjadi domain dari organisasi anggota La Via Campesina yang di Indonesia masih fokus pada gerakan petani desa. Dengan pertanyaan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktek *urban farming* dalam mengaplikasikan beberapa konsep kedaulatan pangan yang akan dielaborasi dalam bagian kerangka teoritis nanti. Sedangkan subpertanyaan kedua adalah: *bagaimana gerakan kedaulatan pangan yang berfokus di area pedesaan dalam melihat pentingnya gerakan urban farming dan bagaimana keduanya dapat menjalin solidaritas?* Dengan pertanyaan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana dialektika antara gerakan pedesaan dan perkotaan dalam mengonstruksikan kedaulatan pangan. Solidaritas dalam mengonstruksikan kedaulatan pangan yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang memungkinkan dilakukan dengan kerjasama kedua belah pihak dalam melaksanakan konsep kedaulatan pangan ini yang tidak terpisah secara geografis area geografis maupun kelas, antara pedesaan dan perkotaan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancara. Kvale dan Brinkmann (2009) menyatakan bahwa wawancara penelitian kualitatif berusaha untuk memahami fenomena dunia dari titik pandang subjek yang diteliti untuk mencari tahu pengalaman mereka, sebelum mendudukkannya dalam penjelasan saintifik. Pendekatan yang digunakan adalah dengan fenomenologi, yang dalam pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai minat atau keinginan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif pelaku sendiri dan untuk menggambarkan pengalaman yang dialami subjek, dengan asumsi bahwa realitas penting adalah persepsi seseorang tentang bagaimana sesuatu seharusnya terjadi (*ibid*).

Metode kualitatif ini akan dilakukan pada area penelitian Bandung, Jakarta dan Bogor yang menjadi tempat munculnya beberapa gerakan *urban farming*. Pertanyaan penelitian yang bersifat semi-terstruktur dan *open-ended* akan ditanyakan dalam wawancara mendalam atau *focus group discussion* untuk menggali informasi dari perwakilan pegiat perkebunan urban dan gerakan kedaulatan pangan yang berfokus di pedesaan.

Pertanyaan bagi pegiat perkebunan perkotaan akan berkisar mengenai praktek pertanian yang dilakukan dan hubungannya dengan konsep kedaulatan pangan (untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama) dengan berfokus pada aspek lokalisasi dan pemeliharaan lingkungan. Sementara untuk perwakilan gerakan kedaulatan pangan pedesaan, pertanyaan akan berkisar mengenai bagaimana mereka melihat signifikansi gerakan *urban farming* dan kemungkinan untuk menghubungkan mereka dengan gerakan *urban farming* dalam kerangka kedaulatan pangan.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan metode wawancara dan survei, sementara data sekunder dikumpulkan dari tinjauan terhadap berbagai literatur, juga buku, jurnal dan makalah akademis, termasuk laman-laman internet yang reliabel.

Dalam pengumpulan data primer, persetujuan akan diminta dan isu etis seperti kerahasiaan responden (jika dipersyaratkan) akan ditaati. Tantangan untuk diantisipasi dan dipersiapkan dalam penelitian ini adalah karena peneliti tidak memiliki keterlibatan dengan gerakan *urban farming*, sementara di sisi lain juga akan menganalisisnya secara kritis.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkonfirmasi berbagai interpretasi dan motif dari komunitas perkebunan di perkotaan selain sikap oposisi yang jelas terhadap sistem pangan dominan yang ada saat ini. Sebagian besar dari perwakilan jaringan Indonesia Berkebun mengekspresikan bahwa motif utama mereka adalah untuk meningkatkan kondisi lingkungan dengan menggunakan lahan kosong di perkotaan, dan untuk mengedukasi atau menyebarkan kampanye kepada publik untuk melakukan hal yang sama (berkebun). Serupa dengan komunitas yang terlibat dalam program urban farming di

Kacapiring, Bandung, yang sebelum melakukan urban farming mereka telah menanam tanaman hias dengan tujuan untuk menghijaukan daerahnya. Salah seorang narasumber lain mengaitkan antara aktivitas berkebun dengan perbaikan kesehatan dan nutrisi untuk komunitas, terutama anak-anak di lingkungan kebun. Sementara itu di rusun Marunda, motif mereka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk bertahan dengan penghasilan mereka yang sederhana, untuk mendukung ketersediaan pangan bagi rumah tangga dan apabila para tetangga ingin membeli sayur-sayuran dari mereka, itu menjadi penghasilan tambahan di samping pekerjaan suaminya yang tidak formal dan tidak tetap.

Walaupun pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan perhatian dan kesadaran mereka terhadap ketidaksetaraan sistem pangan dan krisis kesehatan dan lingkungan, tetapi tidak satupun yang mengalamatkan resistensinya secara tegas terhadap logika industri dan pasar bebas. Sebagai tensi dialektis, bisa jadi posisi mereka terhadap hal tersebut masih terbatas berada di pemikiran individu beberapa anggota, tetapi dalam tingkat komunitas, wacana yang dikemukakan masih berkaitan dengan kesenjangan ekologi saja, sementara kesenjangan sosial yang disebabkan penguasaan industri dan kesenjangan individu akibat terpisahnya “*people from nature*” belum banyak dibahas.

Penelitian ini menganalisis “skala” dari komunitas *urban farming* yang diteliti dengan menggunakan konsep lokalitas yang lebih elaboratif dan komprehensif dari Montenegro dan Iles (2015). Mereka mengajukan beberapa pengertian tentang “skala” yang terdiri dari “ukuran”, “level” dan “relasi.”

Dari segi “ukuran,” skala *urban farming* yang diteliti jelas hanya mampu berkontribusi sangat sedikit (jika tidak dikatakan masih jauh) secara kuantitas bagi ketahanan pangan bahkan untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Pertama, karena dari awal komunitas tidak memiliki target dan strategi spesifik bagaimana memproduksi jumlah pangan yang cukup untuk konsumsi anggotanya, walaupun anggota dari komunitas di Marunda hampir selalu memiliki hasil sayurannya di dapur mereka. Dengan demikian, yang kedua, mereka tidak memiliki pencatatan dan pendataan spesifik dalam mengkuantifikasi proses dan hasilnya. Walaupun komunitas juga

mendorong anggotanya untuk berkebun di rumahnya, tetapi jumlah mereka yang melakukannya juga tidak terhitung dan masih sulit untuk diketahui.

Serupa dengan elemen selanjutnya dari “skala” yaitu “level,” komunitas *urban farming* di Indonesia belum memiliki pengaturan organisasi yang jelas dan sistematis, bahkan untuk yang diinisiasi oleh pemerintah (kota). Penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia, polanya masih acak dalam hal area yang dicakup. Di satu area, kebun komunitas yang aktif beroperasi di tingkat kelurahan, tetapi di area lain yang paling aktif terdapat di tingkat RT, secara terpisah. Tidak ada target dan strategi spesifik untuk mencakup seluruh area secara hirarkial berdasarkan kebutuhan dan prioritas spesifik. Begitu pula dengan jaringan Indonesia Berkebun yang beroperasi secara independen dari program pemerintah kota, walaupun telah berkembang hingga ke 33 provinsi yang mewakili pulau-pulau besar di Indonesia (Indonesia Berkebun, 2015), tetapi sebagian besar mereka hanya memiliki satu kebun komunitas di satu kota dengan skala yang tidak selalu mewakili proporsi populasi yang ada.

Elemen lain yang diteliti adalah skala “relasi.” Hal ini menjadi argumen utama Montenegro dan Iles (2015) bahwa kedaulatan dapat dihasilkan dari koneksi yang mencakup infrastruktur spasial, temporal, epistemik dan sosial di antara berbagai tingkatan dan proses. Skala relasional ini dapat dikonseptualisasikan sebagai jaringan dari elemen-elemen dan proses dan sistem adaptif yang kompleks. Pengembangan relasi seperti itu masih jarang ditemukan di komunitas *urban farming* yang diteliti. Bahkan di daerah yang programnya dipromosikan oleh pemerintah kota, komunitas jarang sekali berinteraksi dengan Dinas Pertanian kecuali untuk satu dua kali ketika menurunkan bantuannya seperti bibit atau peralatan, tanpa kemitraan rutin seperti supervisi atau pendampingan (wawancara dengan Sumardi, pegiat *urban farming* di Kacapiring, Bandung). Walaupun jejaring Indonesia Berkebun juga memiliki anggota berbasis universitas, termasuk institut pertanian (Indonesia Berkebun, 2015), tetapi kemitraan dan komunikasi dengan institusi riset tidak banyak terdengar dalam konteks riset dan pengembangannya.

Perhatian terhadap alam secara eksplisit dijelaskan sebagai motif utama bagi komunitas *urban farming*, dan hal ini juga merupakan bagian dari elemen komplementer dari diferensiasi “lokal” berkaitan dengan “karakter”

(peasantry/kapitalis) dan “metode” (konvensional/tradisional). Komunitas mencoba untuk membawa kembali “alam” ke kota. Mereka juga mengkampanyekan gaya hidup hijau kepada anggotanya, termasuk edukasi kepada anak-anak. Dalam beberapa hal, ini juga sejalan dengan prinsip kedaulatan pangan yang menentang kerusakan lingkungan disebabkan sistem pangan industrialis.

Hal lain yang seharusnya diantisipasi oleh pertanian perkotaan adalah kondisi lingkungannya yang berada di antara polusi dan degradasi industri perkotaan. Saed (2012) menyatakan bahwa akan menjadi ironi jika pertanian dilakukan di kondisi perkotaan industrialis, karena mereka hanya menjadi “pembersih” dan merehabilitasi fungsi lingkungan yang dirusak oleh industri di perkotaan. Gerakan “hak terhadap kota” hanya akan membawa keberhasilan yang semu jika tidak memperhatikan hubungan yang komprehensif antara ekosistem dan juga kesehatan masyarakat, terlebih jika terpapar oleh kontaminan dari industri yang berdampak pada populasi dengan risiko bahaya yang panjang atau permanen (*ibid*).

Gerakan kedaulatan pangan pada akhirnya menyetujui bahwa populasi perkotaan harus dipertimbangkan dan dirangkul, dalam istilah van der Ploeg (2013): untuk menciptakan relasi pertukaran yang menguntungkan. Perwakilan SPI (Serikat Petani Indonesia) mengungkapkan bahwa kedaulatan pangan sebenarnya tidak membedakan desa-kota, terlebih jika terdapat sarana produksi maka itu sebaiknya digunakan. Tetapi mereka juga menyatakan bahwa produksi pangan perkotaan semata tidaklah cukup. Mereka menyarankan setidaknya ada dua syarat untuk membangun hubungan antara gerakan pangan pedesaan dan perkotaan yaitu, pertama membangun kesadaran konsumen mengenai sistem pangan yang bukan hanya berkaitan dengan produksi, dan kedua, bagaimana gerakan konsumen dapat membangun solidaritas dengan pedesaan. Di sini mereka mengingatkan bahwa komunitas *urban farming*, bagaimanapun adalah konsumen dalam sebagian besar sumber pangan yang dikonsumsinya. Dengan demikian, apabila mereka ingin mempraktekkan sistem pangan lokal, mereka dapat mendukung untuk menyerap produksi pedesaan daripada berpihak kepada sistem pangan korporat.

Keduanya harus mencari *bonding issue* yang sama sebagai awalan seperti makanan lokal atau organik karena populasi urban mungkin memiliki kebutuhan dan

kultur populasi kota yang berbeda, walaupun kemudian perlu untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang nilai-nilai kedaulatan pangan (wawancara SPI dan KRKP [Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan]). Untuk ini, diperlukan pelibatan dengan cara-cara kreatif dari berbagai kelompok konsumen termasuk kelompok berbasis kuliner lokal, gerakan Slow Food, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini juga dapat mempromosikan hubungan dengan sumber daya pangan dari petani desa termasuk produk hilirisasi mereka, dan membangun kemitraan dalam menyebarkan ide kedaulatan pangan (wawancara dengan KRKP). Contoh lainnya, mereka bisa mengadakan semacam “tur kedaulatan pangan” dengan mengunjungi salah satu area dengan praktek terbaik sekaligus mempertemukan gerakan pedesaan dan perkotaan¹.

4. Kesimpulan dan Saran

Dari studi kasus dari tiga kota yaitu Jakarta, Bandung dan Bogor, penelitian ini menyimpulkan:

1. Wacana tentang kedaulatan pangan belum banyak terpapar bagi komunitas *urban farming* karena setidaknya dua alasan. Pertama, *urban farming* sebagai gerakan memiliki latar belakang dan akar historis yang berbeda dengan kemunculan gerakan kedaulatan pangan. Kedua, antara keduanya juga memiliki perbedaan karakter sosial dan politik pangan.
2. Namun, penulis berpendapat bahwa gerakan *urban farming* ini menjadi satu tanda diawalinya fase transisi gerakan pangan menuju daerah perkotaan yang dapat menjadi kesempatan yang terbuka untuk menyertakan ide-ide kedaulatan pangan dalam pembentukan aktivisme pangan yang lebih berkesinambungan dan adil.
3. Analisis dengan menggunakan konsep “*multiple scale*” dari Montenegro dan Iles (2015) menunjukkan masih banyak upaya yang perlu dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan skala institusional dan relasional yang dengannya dapat mengungkit struktur dan jaringan organisasi karena jika hanya mengandalkan

¹ Sebagai contoh tur yang dilaksanakan oleh Food First, article: repub.eur.nl/pub/77939/Metis_206721.pdf

perkebunan mereka yang ada sekarang jelas tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pangan di kota.

4. Berkaitan dengan hal pemeliharaan lingkungan, dalam beberapa bagian mereka memiliki ikatan yang sama dengan prinsip kedaulatan pangan seperti: skala kecil, mencoba memanfaatkan interaksi alami untuk pengontrolan gangguan, menumbuhkan keanekaragaman tumbuhan, tidak menggunakan input kimia dan dalam beberapa hal juga mengungkapkan pentingnya hubungan antara manusia dan alam. Akan tetapi, “agroekologi” sebagai prinsip spesifik yang ditawarkan oleh kedaulatan pangan juga belum menjadi ide utama mereka melainkan “organik.”

Saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dibutuhkan gerakan kedaulatan pangan yang lebih inklusif bagi populasi perkotaan, sedangkan komunitas urban pun harus merefleksikan gerakannya untuk lebih kritis terhadap sistem pangan industrialis saat ini.
2. Walaupun diakui *urban farming* sebagai inisiatif yang baik, tetapi mempertimbangkan skala mereka untuk mengatasi seluruh sistem pangan, haruslah diikuti setidaknya dengan dua hal. Pertama, adalah membangun juga konsumerisme reflektif karena pekebun perkotaan juga merupakan bagian dari kelompok konsumen, dan yang kedua, membangun hubungan konsumen urban tersebut dengan produsen pangan dari pedesaan.
3. Dari sisi sebaliknya gerakan kedaulatan pangan juga seharusnya memperhatikan perbedaan karakteristik (latar belakang sosial-ekonomi, pandangan politik pangan) dari masyarakat perkotaan dengan membuat mekanisme yang sesuai dengannya tanpa melupakan prinsip-prinsip kedaulatan pangan.

Diharapkan dengan hadirnya penelitian ini dapat membawa inspirasi dan refleksi untuk memperkaya diskursus kedaulatan pangan bahwa setiap konteks, *setting*, dan geografi yang berbeda membutuhkan strategi dan *entry point* yang berbeda pula untuk diperhatikan. Penelitian lebih lanjut akan sangat bermanfaat jika bisa menelaah gerakan perkotaan yang lain, bukan hanya yang berkaitan dengan produksi seperti *urban farming*, tetapi juga yang berkaitan dengan upaya pembuatan rantai distribusi atau berbasis konsumsi seperti grup kuliner lokal, gerakan Slow Food, dan yang semisal.

Penghargaan

Penulis haturkan rasa terima kasih tak terhingga kepada Parikesit, M.Sc., Ph.D, Kepala Program Studi PSMIL Unpad, sekaligus pembimbing bagi penulis; Sunardi, M.Si., Ph.D; Dr. Ir. Engkus Kusnadi Wikarta, M.SP; dan Prof. Dr. Opan S. Suwartapradja, M.S selaku komisi pembahas; Beasiswa Unggulan Dikti sebagai penyanggah dana pendidikan penulis di PSMIL Unpad dan seluruh staf pengajar di lingkungan PSMIL Unpad yang telah memberikan banyak perspektif baru bagi penulis.

Daftar Pustaka

- Akram-Lodhi, A.H. (2015) 'Accelerating Towards Food Sovereignty', *Third World Quarterly* 36(3): 563-583.
- Alonso-Fradejas, A., Borrás, S. M. Jr., Holmes, T., Holt-Giménez, E. and Robbins, M.J (2015) 'Food Sovereignty: Convergence and Contradictions, Conditions and Challenges', *Third World Quarterly* 36(3): 431-448.
- Block, D.R., N. Chávez, E. Allen and D. Ramirez (2012) 'Food Sovereignty, Urban Food Access, and Food Activism: Contemplating the Connections through Examples from Chicago', *Agriculture and Human Values* 29(2): 203-215.
- Borrás, S.M. (2010) 'The Politics of Transnational Agrarian Movements', *Development and change* 41(5): 771-803.
- Borrás Jr, S.M., M. Edelman and C. Kay (2008) 'Transnational Agrarian Movements: Origins and Politics, Campaigns and Impact', *Journal of Agrarian Change* 8(2-3): 169-204.
- Clendenning, J., Dressler, W. H. and Richards, C. (2015) Food justice or food sovereignty? Understanding the rise of urban food movements in the USA' *Agric Hum Values* DOI 10.1007/s10460-015-9625-8
- Edelman, M., Weis, T., Baviskar, A., Borrás, S. M., Jr, Holt-Giménez, E., Kandiyoti, D., and Wolford, W. (2014) 'Introduction: Critical Perspectives on Food Sovereignty', *Journal of Peasant Studies* 41(6): 911-931.

- Gürcan, E.C. (2014) 'Cuban Agriculture and Food Sovereignty: Beyond Civil-Society-Centric and Globalist Paradigms', *Latin American Perspectives* 41(4): 129-146.
- Indonesia Berkebun (2015) *Urban Farming Ala Indonesia Berkebun*, Jakarta: Agromedia
- Ishii-Eiteman, M. (2009) 'Food Sovereignty and the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development', *Journal of Peasant Studies* 36(3): 689-700
- Jarosz, L. (2014) 'Comparing Food Security and Food Sovereignty Discourses', *Dialogues in Human Geography* 4(2): 168-181.
- Kvale, S and Brinkmann, S. (2009) *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. California: Sage Publication
- Lyons, K., C. Richards, L. Desfours and M. Amati (2013) 'Food in the City: Urban Food Movements and the (Re)- Imagining of Urban Spaces', *Australian Planner* 50(2): 157-163.
- McMichael, P. (2014) 'Historicizing Food Sovereignty', *Journal of Peasant Studies* 41(6): 933-957.
- Montenegro de Wit, M. and A. Iles (2015) 'Sovereignty at what Scale? an Inquiry into Multiple Dimensions of Food Sovereignty', *Globalizations* 12(4): 481-497.
- Nyeleni Declaration Report (2007) accessed 4 June 2015
<http://nyeleni.org/spip.php?article290>
- Robbins, M. J. (2015) Exploring the 'localisation' dimension of food sovereignty', *Third World Quarterly* 36(3): 449-468
- Saed (2012) "Urban Farming: The Right to What Sort of City?", *Capitalism Nature Socialism*, 23:4, 1-9
- van der Ploeg, J.-D. (2013) *Peasants and the Art of Farming: A Chayanovian Manifesto*, Canada: Fernwood Publishing